

# PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA MELALUI PERTANIAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS PROGRAM LUMBUNG MATARAMAN DI DIY

Wahyu Riawanti

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

riawantiwahyu@gmail

## ABSTRACT

*Sustainable farming became a bit more notorious after global idea of Sustainable Development Goals (SDGs) was introduced in 2015. In national Indonesian level, the idea was interpreted well in national program called Sustainable Food Providing Households (KRPL-Ind). KRPL program was designed to enormously sustaining land in household level. Furthermore, this idea was translated in local level based on the locality and spatial character. In Yogyakarta Special District, sustainable farming for limited land was constructed in Food Security Body with Lumbung Mataraman Program. The main objective of the program is to eliminate poverty, so that the impact of program should increase the farmers' income. This research was aimed to reveal the implementation of program. It includes what obstacle faced and that effort can succeed it. Methods used in this research were FGD and observation. Focus Group Discussion and intensive observation were obtained from 5 women farmer groups. The early research was organized in different location of 4 districts and 1municipal. The early result can be reported as two main aspects related to human resource and propar government program. The early conclusion were: (1) human resources and the preparedness of the farmers group (2) content of Lumbung Mataraman program should be adjusted so that it would suit the need of the group members. Furthermore, the benefit gained from this program was the ability of farmers' family to provide their own food and average monthly income of IDR 1.107.000,- obtained.*

### **Abstract**

*Keyword: Family income, sustainable farming, women farmers' group, participatory, Lumbung Mataraman.*

---

## PENDAHULUAN

---

Penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis khususnya, dan masyarakat pada umumnya terkait wacana kelestarian pertanian termasuk ikutannya yaitu penyediaan pangan

dan lingkungan. Keprihatinan terbesar adalah ketidakmampuan bersama dalam menjaga dan kemudian memperoleh pangan secara berkelanjutan. Penyediaan pangan yang berkelanjutan merupakan sarana utama dalam mewujudkan mimpi bersama bangsa Indonesia

untuk mencapai kedaulatan pangan.

Pertanian berkelanjutan, seperti diketahui bersama menjadi wacana yang lebih kekinian setelah dicanangkannya ide global *Sustainable Development Goals (SDGs)* menggantikan *tagline* MDGs. Wacana SDGs membawa semangat “serba berkelanjutan” di hampir semua aspek kehidupan. Dalam konteks pertanian dan pangan terdapat setidaknya tiga SDGs dengan tujuan utama “*zero hunger*” atau memerangi kelaparan.

Pada level yang lebih kecil di tingkat daerah implemetasi program yang bertujuan *zero hunger* memiliki cara kerjanya sendiri-sendiri. Tujuan utama program daerah utamanya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Di D.I Yogyakarta konsep ini dielaborasi menjadi program Lumbung Mataraman yaitu menciptakan pertanian pangan lestari tingkat rumah tangga yang berorientasi pada tujuan akhir berupa pengurangan tingkat kemiskinan. Karenanya dampak kegiatan harus secara nyata dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan usaha LM untuk menunjukkan manfaat yang diperoleh. Diharapkan keluarga petani akan mendapatkan manfaat berupa penyediaan pangan melalui pekarangan dan peningkatan pendapatan keluarga.

Kontestasi dan terminologi kearifan lokal dan pertanian berkelanjutan sebenarnya berkelindan pada satu kata kunci yang mengikatnya menjadi benang merah, yaitu: perilaku yang bertanggungjawab. Terkait dengan kearifan lokal tersebut, wacana pertanian berkelanjutan telah dipraktikkan pada masa sebelum dunia pertanian berubah orientasi menjadi “*productio-oriented*” yang didukung penuh oleh Revolusi Hijau. Dengan segala kebaikannya, pembangunan pertanian yang semata-mata bercita-cita produksi tinggi membawa dampak negatif yang tak sedikit. Saat ini sektor pangan dan pertanian menghadapi tantangan produksi sembari harus menyelesaikan masalah dampak lingkungan yang telah diwarisi.

Kajian ini berusaha untuk menjawab tantangan sulit tersebut dengan kemungkinan yang bisa dilakukan.

Penelitian lain secara singkat sebagai berikut. Konsep kearifan lokal yang sesungguhnya bermakna lebih luas dan filosofis. Kearifan lokal orang Bupolo di Pulau Buru Maluku bahkan bisa dibilang *beyond* teknologi (Pattinama, 2009). Kearifan orang Buru setidaknya mencakup penataan kawasan, organisasi waktu, dan pengorganisasian makanan.

Kearifan lokal yang paling sering diangkat dalam tema penelitian adalah lokalitas masyarakat di Bali. Kearifan Lokal yang menjadi contoh adalah *Tri Hita Karana Hindhu Philosophy*. *Tri Hita Karana* adalah filosofi kuno Hindu yang berarti “tiga hal yang menjadikan kemakmuran” dalam bahasa sansekerta Bali. Konsep yang berpegang pada Tuhan, kemanusiaan dan alam yang menjadi inspirasi semua laku dalam mengejar kebahagiaan dan kemakmuran yang hanya bisa dicapai dengan ketika manusia berada dalam keseimbangan dan harmoni dengan Tuhan, dengan dan antara manusia, serta lingkungan. Di banyak negara berkembang lainnya konsep kearifan lokal telah dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih luas, *beyond of the old fashioned tradition*.

Sejumlah besar penelitian lain telah dilakukan terkait pertanian berkelanjutan. Pada berbagai kasus di negara Asia kajian ini dapat disimpulkan dalam review yang menunjukkan bahwa (1) sejauh ini banyak politisasi pangan dan pertanian yang memanipulasi ide pertanian berkelanjutan semata mata menjadi agenda politis, (2) pertanian berkelanjutan semestinya merupakan tanggung jawab bersama dan bukan cita-cita pemerintah yang dibebankan pada masyarakat pertanian, dan (3) kearifan lokal tidak harus diidentikkan dengan pertanian konvensional yang tidak tersentuh teknologi.

Serangkaian referensi tersebut memunculkan satu pertanyaan yang menjadi

permasalahan dalam kajian ini, yaitu: **masih dapatkah selamat dari jebakan masalah pangan global dengan menyediakan sendiri pangan kita?**. Pertanyaan tersebut kemudian dielaborasi menjadi dua pertanyaan turunan yaitu (1) bagaimana pemerintah merespon isu pangan berkelanjutan melalui implementasi kebijakan di tingkat keluarga petani dan (2) bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi suatu program yang benar-benar implementatif dalam masyarakat dengan hasil akhir berupa peningkatan pendapatan keluarga.

### **REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

Titik tolak penelitian ada pada kearifan lokal. Dalam kajian tentang *lokal wisdom* Graham (1991) mengajukan pertanyaan menarik tentang bagaimana seandainya yang terjadi di dunia ini bukanlah bagian dari fenomena yang disebut globalisasi. Seandainya yang terjadi adalah serupa dengan *global imaginary*. Menurutny, pertanyaan ini relevan karena di dalam globalisasi proses (emosional) yang bukan merupakan sesuatu yang alami. Tiba-tiba suatu bangsa kehilangan kesederhanaannya, wadah sosial yang tadinya begitu dikenal secara perlahan menghilang, batas antar negara menjadi kabur, jalinan antar budaya terlepas dan tiba-tiba kita menjadi demikian teresponse. Telanjang. Dalam konteks ekonomi, katanya lebih lanjut, gara gara globalisasi pemerintah yang tadinya melindungi kita dari ekonomi dunia sekarang mendorong kita untuk menghadapinya (Graham dalam Lokal Wisdom, 1991).

Untuk menjelaskan kearifan lokal dalam program pertanian berkelanjutan, digunakan teori *participatory* sebagai pijakan untuk membahas kajian ini. Kajian ini fokus pada bagaimana kebijakan pemerintah yang menerjemahkan wacana global SDGs dengan mengedepankan isu kearifan lokal. Sebagai batasan pembahasan, kebijakan publik adalah apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jika

pilihannya hanya memakai nalar dan rasionalitas pemerintah maka apapun bentuk kebijakannya, ia hanya akan bekerja untuk pemerintah dan bukannya untuk masyarakat.

Kajian tentang SDGs pernah ditulis, lebih tepatnya diramalkan secara komprehensif dalam artikel yang ditulis pada tahun 2012. Baik MDGs maupun SDGs merupakan dua hal yang sama pentingnya, di mana hampir semua negara sedang berusaha memenuhi keduanya. Secara teknis aspek mayoritas MDGs lebih menekankan pada peningkatan kualitas kesejahteraan manusia secara individu (dalam IPM –Indeks Pembangunan Manusia), yaitu memenuhi kualitas indeks pembangunan berupa pendidikan, kesehatan dan akses air bersih.

Sementara itu agenda SDG selain mencita-citakan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang sama (udara bersih dan keragaman hayati) juga mengacu pada pencegahan dan penyediaan barang publik (mengurangi perubahan iklim, stabilitas keuangan) yang kesemuanya hanya bisa diukur dengan indikator makro. Pencegahan dan penyediaan barang publik tersebut bukanlah tujuan tetapi merupakan prasyarat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa indikator di antaranya sudah termasuk dalam MDG 8 (keuangan dan sistem perdagangan dunia yang berkeadilan). Ringkasnya, SDGs menekankan pada barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Pada titik ini, secara teori titik tekan utama berada pada entitas si penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam suatu program. Ketika masalah utama penyelenggaraan negara ini berada pada sumber daya masyarakat, maka bisa dipastikan suatu program harus tepat sasaran dalam arti dilakukan dan diperuntukan penerima manfaat yang tepat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara teori pertanian berkelanjutan adalah praktik pertanian yang bertanggung jawab terhadap generasi selanjutnya. Secara komprehensif penelitian

tentang pertanian berkelanjutan dilaporkan oleh FAO (2009) dan secara khusus dilaterapkan di Ghana (2000). FAO menganggap waca ini penting karena pertanian modern seringkali mengabaikan pengetahuan dan keterampilan tradisional. Padahal pertanian organik yang belakangan sangat populer dilakukan berdasarkan pada praktik pertanian, pengamatan, pengalaman maupun secara intuisi yang sebenarnya merupakan sistem tradisional yang tidak mengandalkan input pertanian modern.

Adaptasi pengetahuan tersebut menurut Tengö dan Belfrage (dalam FAO, 2009) sangat penting untuk mengatasi agro ekosistem yang kompleks, pemuliabiakan benih dan bibit lokal, maupun dalam memproduksi pupuk secara *on-farm* (kompos, pupuk kandang, pupuk hijau) dan pestisida alami yang terjangkau. Dalam hal meningkatkan kualitas tanah, praktik pertanian yang melestarikan dan meningkatkan kesuburan tanah sangatlah penting dalam peningkatan produksi pangan.

Penelitian di Ghana tentang pertanian berkelanjutan melaporkan bahwa diperlukan amunisi pengetahuan multi-disiplin untuk menjelaskan dan menjalankan pertanian berkelanjutan di era modern (ICRD, 2000). Sementara itu Malaysia menangkap kesempatan untuk menjalankankan pertanian berkelanjutan dengan mengembangkannya dengan pariwisata dan seni (SDGs Malaysia, 2016). Secara parallel hal ini sudah dikembangkan juga di Indonesia. Contoh pengembangan potensi wisata pada masyarakat berbasis komunitas adalah tujuan wisata Kalisuci di Kecamatan Semanu Gunung Kidul. Produk wisata yang dijual dalam hal ini adalah pengalaman mengarungi tubing gua sepanjang aliran sungai dan gua di Kalisuci. Kata kunci dari keberhasilan pengembangan wisata di pedesaan ini adalah partisipasi masyarakat dalam manajemen pada *Kalisuci Cave Tubing* di dusun Pancarejo Semanu, Gunungkidul (AU Faza dalam RRPg, 2016).

Kearifan lokal juga telah diteliti oleh peneliti sebelumnya (AU Faza dalam RRPg, 2016; Kusumasari, 2016; ). Kusumasari (2016) melaporkan dalam hasil penelitian di Kabupaten Gunung Kidul tentang kearifan lokal masyarakat Jawa dalam mitigasi bencana di Gunung Kidul. Petani pada umumnya memanfaatkan pengalaman pribadi dan praktik lokal dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Menyusul fenomena *climate change*, dampak yang paling dirasakan oleh petani adalah gagal panen dan penurunan dalam hal jumlah maupun kualitas produksi yang menyebabkan turunnya pendapatan petani. Penelitian melaporkan bahwa biaya produksi meningkat sebesar 50% sementara pendapatan meningkat hanya sekitar 25% sejak perubahan iklim mempengaruhi budidaya pertanian. Merespon hal tersebut, petani menerapkan strategi dengan mengubah pola tanam, penggunaan teknik pengolahan tanah, teknik PHT dan pengairan/irigasi.

Titik tekan keberhasilan program tersebut ada pada keikutsertaan masyarakat atau *participatory*. Dalam penelitiannya, Lightfoot (1997) menjelaskan bahwa *participatory* petani pada awalnya adalah dalam hal mengidentifikasi sumber daya alam. Semua jenis sumber daya alam termasuk tanaman pangan, ternak dan ikan dituangkan dalam peta dan informasi topografi. Hasil pengamatan petani dan perusahaan digabungkan dalam suatu *Bioresource* dan dimodifikasi menjadi suatu diagram konseptual yang mencantumkan tempat- tempat utama. Selanjutnya petani melakukan pengamatan ini dan membentuk pertemuan kelompok untuk pembelajaran “farmer-to-farmer.”. Dalam kesempatan ini peneliti mencatat semua perkembangan dan memperkenalkan teknik yang baru dalam hal melestarikan sumber daya alam. Penelitian dilakukan selama dua musim pada tiga kelompok petani di Philippines yang menggambarkan bagaimana manajemen SDA dapat ditingkatkan (Lightfoot, 1997).

Meski demikian mengevaluai tentang *participatory* bukanlah hal mudah. Dalam kajiannya tentang evaluasi *participatory*, Jackson dan Kassam (1998) melaporkan hasil penelitian berupa *policy brief* yang sangat tidak biasa. Penelitian yang didanai oleh World Bank dilakukan di La Paz, Bolivia dan Guayaquil, Ecuador. Kajian ini membahas metode evaluasi yang kontroversial. Pada kebanyakan project yang dijalankan oleh LSM internasional, masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan informasi yang memadai, dan tiadanya komunikasi antara penerima manfaat dan project managers. Usulan evaluasi yang dimaksud adalah dengan melakukan pelatihan kepada para penerima manfaat untuk menjadi peneliti. Selanjutnya “peneliti” yang juga *beneficiary* ini menyajikan apa yang sudah diketahuainya dalam format laporan yang semi-formal. Inilah yang disebut sebagai pengamatan *participatory*. Metode pengamatan *participatory* oleh sejumlah kalangan dianggap rumit dan merepotkan. Meski demikian metode ini diapresiasi oleh para donor untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan project.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, *in-depth interview* dan diskusi kelompok fokus. Triangulasi data berupa data primer kualitatif yang diperoleh dari studi kasus pada lima kelompok wanita tani (KWT) di lima lokasi kabupaten/kota. Selanjutnya dilakukan triangulasi data primer dengan data sekunder dari sumber lain termasuk BPS/World Bank.

### Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di lima lokasi KWT di empat kabupaten dan satu kota di DIY terhitung bulan Januari hingga bulan Juli 2017 yang meliputi penyusunan desain kegiatan, layout LM/KRPL, pengumpulan data melalui FGD dan

kuesioner dan pengolahan data serta penulisan laporan. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa terdapat kecamatan-kecamatan di DIY yang merupakan kantong kemiskinan yang lebih *vulnerable* sehingga merupakan daerah yang paling tepat untuk memperoleh program pemberdayaan.

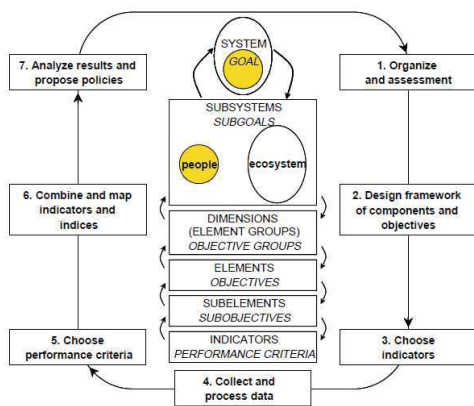
**Metode Pengambilan Sampel Penelitian** ini menggunakan metode observasi dengan pengamatan langsung melalui pendampingan. Pengambilan sampel responden untuk kuesioner berupa anggota KWT dan anggota masyarakat dilakukan dengan cara *Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak terhadap jumlah populasi wanita anggota KWT yaitu sebanyak 20 orang per KWT. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada petani yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner serta dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari data statistik dan referensi lain terkait dengan penelitian ini.

**Analisis Data** Data primer dan data sekunder diperoleh terlebih dahulu dan ditabulasikan serta disajikan didalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Menjawab tujuan penelitian 1 dan 3 secara deskriptif, sedangkan menjawab tujuan penelitian 2. Analisis penghitungan *Revenue-Cost Ratio (RCR)* dilakukan untuk mengukur kelayakan budidaya dalam Lumbung Mataraman yang dilakukan di lokasi demplot masing-masing KWT. Analisis dilakukan dengan menghitung penerimaan dan pengeluaran Soekartawi (2005)

Metode analisis yang dilakukan mengacu pada analisis *participatory* yang menekankan pada justifikasi dan keterlibatan (*closure*) dalam masyarakat (Stirling, 2006: 95). Pendekatan ini banyak dipakai dalam analisis Kebijakan Lahan. Analisis ini dipilih karena kedekatan kasus terkait dengan akses produksi berupa penguasaan lahan pertanian. Pemanfaatan lahan pekarangan

terkait erat dengan kepemilikan lahan yang terbatas. Hal ini menjadi masalah sebagian besar negara berkembang cita-cita pembangunannya diletakkan pada semangat menuju industrialisasi.

Selanjutnya pemilihan indikator menggunakan metode Fraser (2006) yang dimodifikasi. Metode Fraser ini sesungguhnya adalah modifikasi dari metode Prescott Allen (2001) yang menekankan pada wellbeing assesment yaitu mengukur keterlibatan masyarakat dalam menganalisis kebijakan kehutanan di Kanada (Fraser, 2006: 117).

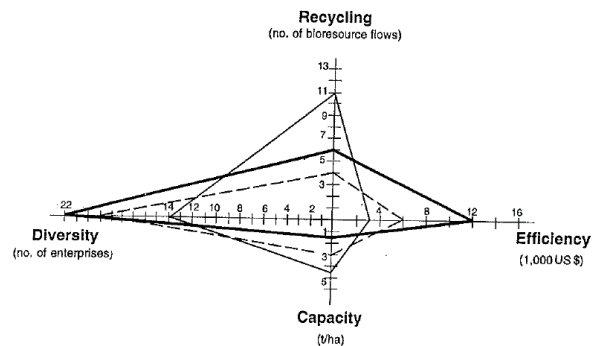


(Fraser, 2006)

**Gambar 1. Analisis Partisipasi Masyarakat Bottom-up dan Top Down**

Langkah penting sesuai dengan gambar satu poin 3 adalah tahap menentukan indikator. Pada prinsipnya tiga variabel dasar yang diadopsi dari metode Fraser adalah (1) *knowledge and culture*/pengetahuan dan budaya, yaitu bagaimana budaya setempat dan pengetahuan lokal dimanfaatkan dalam laku pertanian (2) *community*/masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dan dukungan lembaga formal-

non formal, serta (3) *equity*/kesetaraan, berupa keterlibatan perempuan dalam kegiatan produksi dan ekonomi.



**Gambar 2. Farming System Performance Indicators Kites (Lightfoot et al.)**

Tahap menentukan indikator dilakukan dengan mengelaborasi tiga titik tekan penelitian dalam metode Fraser tersebut di atas menjadi 4 indikator seperti dalam skema yang diadaptasi dari *Farming System Partisipatory Indicators Kites* yang dikembangkan oleh Lightfoot C, et. al. (1999: 84) dalam Gambar 2. Selanjutnya indikator yang dipilih dikembangkan menjadi 3 indikator yang lebih spesifik. Keseluruhan 12 sub-indikator tersebut kemudian dipakai sebagai alat ukur dalam menentukan tingkat partisipatori masing-masing kelompok. Angka yang dipakai dalam skema tersebut merupakan nilai yang mewakili performans kelompok/KWT yang mewakili kabupaten dan kota di D.I Yogyakarta.

**Tabel 2. Indikator dalam Mengukur Tingkat Partisipatori Kelompok**

INDIKATOR	No	Keterangan
Sumber Daya Manusia	1	Kompetensi pengurus dan anggota KWT
	2	Pengetahuan teknis informal maupun formal (pelatihan, penyuluhan, dll)
	3	Pengalaman budidaya dgn kearifan lokal (pranata mangsa, pembenihan tradisional dll)
Kapasitas Kelompok (Kelembagaan)	4	Jumlah anggota KWT aktif dan dukungan warga
	5	Kegiatan budidaya di KWT maupun di luar KWT
	6	Kegiatan non teknis kelompok/ KWT (pertemuan rutin, arisan, simpan pinjam, dll)
Indikator keberlanjutan	7	Distribusi bibit dan benih tanaman/ternak/ikan
	8	Rotasi/regenerasi bibit dan benih siap tanam
	9	Swadaya masyarakat (dana dan prasarana)
Dukungan Komunitas	10	PPL/ Dinas teknis Pemerintah Daerah
	11	Pemerintah Desa/aparat kelurahan
	12	Komunitas/kelompok yang ada di tingkat dusun

(adaptasi dari *Farming System*) *Participatory Indicators Kites*

oleh Lightfoot C, et. al.,1999)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa keberhasilan program ini terutama terletak pada dua hal yaitu (1) kesiapan SDM pertanian berupa kelompok petani yang memiliki karakter dan kesiapan untuk menjadikan pertanian sebagai laku, dan tidak sekedar project oriented, dan (2) untuk pangan berkelanjutan dibutuhkan pula program yang berkelanjutan.

### Kearifan Lokal dan Politik Pangan

Kearifan lokal pernah menjadi agenda utama pemerintah yang sangat strategis. Ide

ini kemudian diusung bersama-sama oleh pemerintah secara nasional maupun daerah menjadi agenda bersama. Dalam banyak kasus kearifan lokal diterjemahkan secara sederhana menjadi konsep “kembali pada yang tradisional”. Tentu tidak ada yang salah dengan hal tersebut, tetapi bicara tentang pangan dan pertanian tidak bisa menegasikan pembahasan tentang teknologi.

Dalam konteks yang lebih luas, ketika kearifan dikembalikan pada definisinya, maka ia juga bukanlah terminologi yang kaku tetapi merupakan ruang luas yang dan fleksibel. Kearifan lokal dalam konteks kebijakan sesungguhnya adalah mengemabalikan pemilik manfaat dari kerja pembangunan yaitu masyarakat. Dengan demikian kearifan memiliki corak yang memenuhi setidaknya dua hal yaitu “karakteristik setempat” dan “masyarakat banyak”. Definisi ini telah berkembang sededemikian cepat , bahwa kearifan merupakan konsep lama yang sudah menjadi topic banyak penelitian. Sayangnya secara umum penulis sering terjebak pada konsep kearifan semata-mata pada apa yang tradisional dan steril dengan teknologi. Konsep kearifan lokal yang sesungguhnya bermakna lebih luas dan filosofis.

Kearifan lokal orang Bupolo di Pulau Buru Maluku sebagai berikut: (a) Pembagian kawasa. Inti dari konsep dan pemahaman terhadap lingkungan dengan berbagai aturan adat dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dan sekaligus mempertahankan nilai keberadaan dari satuan kawasan yang sudah merupakan suatu identitas yang harus dipertahankan, (b) Organisasi waktu menurut pemahaman orang Bupolo disesuaikan menurut fenomena alam dari dua jenis pohon: *Kautefu* (*Pisonia umbellifera* Fors & Soom) dan *Emteda* (*Terminalia* sp.). Untuk pohon yang pertama (*kautefu*), jika buahnya telah mengeluarkan cairan seperti lem, maka musim panas akan tiba atau sering disebut *mena kautefupolo*. Itu berarti kegiatan menebang pohon, membersihkan

lahan dan membakar akan segera dilaksanakan. Pohon yang kedua (*emteda*) lebih banyak dipakai untuk menandai kegiatan mereka sepanjang tahun dan (c) Kearifan lokal berikutnya adalah pengetahuan orang Bupolo mengorganisasikan makanan sesuai dengan aktivitas mereka yang berbeda yakni pada saat di dalam rumah dan di luar rumah. Mereka mengusahakan tanaman sagu (*Metroxylon sagu*) sebagai makanan pokok dan mengkonsumsinya dalam bentuk *papeda*. Sasi adalah seperangkat norma, adat dan aturan dan sanksi mengenai larangan pengambilan hasil tanaman/tumbuh-tumbuhan, ikan dan hewan buruan sebelum waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh pimpinan dan tokoh masyarakat bersama warga masyarakat (*kewang* dan gereja/mesjid) (Pattinama, Marcus J. 2009).

Kearifan lokal yang paling sering diangkat dalam tema penelitian adalah lokalitas masyarakat di Bali. Kearifan Lokal yang menjadi contoh adalah *Tri Hita Karana Hindhu Philosophy*. *Tri Hita Karana* adalah filosofi kuno Hindu yang berarti “tiga hal yang menjadikan kemakmuran” dalam bahasa sansekerta Bali. Konsep yang berpegang pada Tuhan, kemanusiaan dan alam yang menjadi inspirasi semua laku dalam mengejar kebahagiaan dan kemakmuran yang hanya bias dicapai dengan ketika manusia berada dalam keseimbangan dan harmoni dengan Tuhan, dengan dan antara manusia, serta lingkungan.

Selanjutnya dalam menjalankan konsep dan doktrin Tri-Hita Karana Doctrine, warga desa untuk membangun dan menerapkan program pelestarian, program lingkungan seperti Hutan Kera Keramat (the *Sacred Monkey Forest*). Dalam rangkaian adat ini terdapat dua upacara Hindu Bali yang dilakukan di dalam hutan, termasuk di dalamnya ritual *Tumpek Kandang*. Dalam ritual ini masyarakat memberikan sesajen bagi kera dan binatang lainnya dan merayakan *Tumpek Ngunduh* untuk pelestarian pepohonan. Upacara ini sesungguhnya merupakan laku pelestarian yang sudah dilakukan secara komunal untuk

melestarikan, memelihara, dan menyelamatkan pohon dan tumbuhan yang digemakan kembali pada hari ini dalam merespon isu perubahan iklim (Kass Wayan, 2011).

### ***Sustainability* dan Kegagalan Program Pemanfaatan Pekarangan**

Pada masa pemerintahan Jokowi saja agenda pangan menjadi isu utama yang didukung dengan lahirnya ide SDGs. Meski demikian wacana pertanian berkelanjutan bukanlah ide baru dalam masyarakat pertanian. Terkait *sustainable farming*, bahwa pertanian berkelanjutan belum diterapkan menjadi masalah utama di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati Jawa Tengah mengkonfirmasi hal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bertani yang diterapkan petani padi sawah kurang sesuai dengan sistem pertanian berkelanjutan, yaitu pengolahan tanah dengan traktor, sistem monokultur, belum dilakukan pergiliran varietas, lebih mengutamakan pupuk dan pestisida kimia (Praptono, 2010).

Untuk mengukur keberhasilan program dilakukan tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia dilakukan oleh Hadi (2006). Sayangnya program ini sangat sering menjadi program yang semata-mata menjadi *lip-service* pemerintah. Pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar program pemanfaatan pekarangan tahun 2012-2014 menjadi kegiatan yang mangkrak dan berhenti di tengah jalan (BKPP, 2016). Bukti kegagalan tersebut disebabkan terutama oleh SDM yang tidak mendukung.

Tentu tidak adil jika menggambarkan semua program berjalan tidak efisien dan berhenti di tengah jalan. Bukti yang mendukung dilaporkan dalam hasil penelitian tentang partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelompok tani terhadap peningkatan produksi padi sawah di daerah penelitian sangat baik karena tingkat motivasi petani dalam mengikuti



kegiatan kelompok tani dan penerimaan sarana bantuan produksi terhadap anggota kelompok tani berjalan efektif (Matanari, dkk. 2010).

Meski demikian salah satu pembelajaran yang baik adalah dengan melihat kegagalan program yang telah dilakukan. Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia (Hadi, 2006). Memperhatikan konsep dan pendekatan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di atas, secara konseptual kesemuanya sudah mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengutamakan pemberdayaan dalam setiap langkah kegiatannya.

Dari sejumlah *success story* tersebut terdapat benang merah yang menjadi persamaan karakter. Selanjutnya program pemanfaatan pekarangan yang diperbarui harus direvisi dalam hal: (1) SDM yang berkualitas (2) program yang inovatif, dan (3) dukungan serta pendampingan yang tepat.

### **Lumbang Mataraman dan Partisipasi Masyarakat**

Lumbang Mataraman merupakan usaha dalam konteks lokal kemandirian pangan dengan menekankan pada kearifan lokal masyarakat Jawa. Masyarakat Yogyakarta sudah menerapkan tradisi pertanian “**nandur opo sing dipangan lan mangan opo sing ditandur**” yang sepadan dengan *tagline* global “*grow what you eat and eat what you grow*”. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan mulai dari tingkat rumah tangga termasuk pemanfaatan lahan pekarangan (BKPP, 2016).

Lahan pekarangan memiliki multiguna dikembangkan dalam konsep pemanfaatan lahan pekarangan yang dikenal dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh Kementerian Pertanian (Kementan, 2012). Dari hasil evaluasi, keberlanjutan kegiatan ini masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar KRPL hanya bertahan 2-3 tahun setelah kegiatan pemerintah

(bantuan dana) dihentikan, artinya pemberdayaan masyarakat belum dapat tercapai sesuai harapan.

Lumbang Mataraman berawal dari tujuan penerapan pertanian berkelanjutan. Bahwa pertanian berkelanjutan belum diterapkan menjadi masalah utama di Indonesia menjadi alasan utama dilakukannya program Lumbang Mataraman. Seperti halnya di kebanyakan daerah di pulau Jawa, budidaya pertanian di Yogyakarta menerapkan sistem yang kurang sesuai dengan sistem pertanian berkelanjutan. Seperti dikonfirmasi oleh Praptono (2010) ciri budidaya ini adalah pengolahan tanah dengan traktor, sistem monokultur, belum dilakukan pergiliran varietas, dan lebih mengutamakan pupuk dan pestisida kimia.

Selanjutnya dalam program Lumbang Mataraman dilakukan analisis “bongkar masalah” untuk menentukan langkah yang tepat dalam tahapan teknis maupun kelembagaan. Metode bongkar masalah ini merupakan metode asesmen kelompok tani yang telah diterapkan dalam banyak kegiatan pemerintah maupun LSM di Indonesia untuk dapat menyapkan SDM yang berkualitas (Joglo Tani, 2015). Pendampingan dilakukan oleh BKPP bersama dengan Yayasan Joglo Tani.

Asesmen ini diharapkan dapat mengantisipasi masalah utama yang berpengaruh nyata terhadap penerapan pola bertani yaitu status lahan, sedangkan faktor usia petani, pendidikan, pengalaman, status lahan, pengetahuan, dan penyuluhan tidak ada pengaruh nyata terhadap pola bertani. Hasil dari asesmen tersebut berupa bimbingan teknis yang mengacu pada nilai dan kearifan lokal dengan lebih menegaskan karakter pertanian berkelanjutan dalam penerapan Lumbang Mataraman. Seperti disepakati dalam tujuan program, laku pertanian yang lestari diharapkan dapat mencegah dampak pertanian yang tidak berkelanjutan. Dampak tersebut seperti dijelaskan oleh Praptono (2010) adalah: a) dampak lingkungan: terjadi pencemaran lingkungan, penurunan keanekaragaman hayati,

dan kualitas lahan, b) dampak ekonomi: terjadi penurunan pendapatan petani, dan c) dampak sosial: gangguan kesehatan akibat konsumsi beras yang terkontaminasi logam berat dan keresahan petani jika ada gejala input eksternal akibat ketergantungan petani pada input eksternal.

Salah satu pembelajaran yang baik adalah dengan melihat kegagalan program yang telah dilakukan. *Lesson learnt* yang menjadi acuan program Lumbung Mataraman adalah hasil tinjauan yang pernah dilakukan terhadap program pemberdayaan masyarakat di Indonesia (Hadi, 2006). Seperti dikonfirmasi dalam pen ini, secara konsep berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sudah mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengutamakan pemberdayaan dalam setiap langkah kegiatannya. Namun demikian, dalam implementasinya nilai-nilai partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ini masih menjadi nomor dua dibandingkan dengan pencapaian target program.

Meskipun dalam kadar yang jauh berkurang dibandingkan dengan praktek-praktek pembangunan pemerintahan Orde Baru, namun pendekatan 'target' dan 'topdown'; pengabaian nilai-nilai lokal dan bias 'outsiders'; kurangnya partisipasi; dan pendekatan yang parsial, masih dirasakan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut (Hadi, 2006). Misalnya, setiap kali diluncurkan program, setiap kali pula institusi baru dibentuk di tingkat desa, seperti Kelompok Petani-nelayan Miskin (KPK) pada Proyek P4K, Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) pada Proyek NTAADP, dan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang disyaratkan oleh P2KP. Butuh proses dan waktu yang lama untuk membuat lembaga-lembaga baru ini tumbuh dan matang. Sementara perhatian akhirnya lebih banyak tercurah kepada penguatan kelembagaan baru tersebut.

Belajar dari hasil kajian tersebut, untuk mengatasi masalah ego sektoral dan menghindari

pendekatan yang parsial pada masyarakat sasaran yang sama, program Lumbung Mataraman di BKPP mengambil langkah inovatif untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat lebih bersifat bottom up dan jempit bola dengan pendekatan personal kepada kelompok tani yang disasar.

Hal ini menajadi kunci pelaksanaan kegiatan karena keberhasilan program sangat tergantung dari peran dan partisipasi penerima manfaat. Dalam hal ini konfirmasi hasil penelitian telah dilakukan oleh Matanari dkk (2010). Kelompok petani sebagai subyek penelitian dianalisis untuk mengetahui seberapa besar peranan kelompok tani terhadap peningkatan produksi padi sawah di daerah penelitian serta untuk mengetahui tingkat motivasi petani dalam mengikuti kegiatan kelompok tani dan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan bantuan sarana produksi dari kelompok tani kepada anggota kelompok tani.

Metode analisis dalam program Lumbung Mataraman yaitu metode deskriptif dan skoring dengan analisis sesuai metode Fraser (2006) yang dimodifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelompok tani terhadap peningkatan produksi lahan pekarangan selama penelitian sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh setidaknya tiga hal yaitu (a) kekuatan lembaga dan partisipasi masyarakat secara umum. Hal ini mengkonfirmasi hipotesis awal bahwa keberhasilan program ditentukan oleh partisipasi masyarakat, (b) motivasi penerima manfaat dalam memanfaatkan kearifan dan pengetahuan lokal, dan (c) karakter kesetaraan masyarakat yang diwakili oleh keterlibatan anggota KWT.

Khusus pada analisis faktor kegagalan/ keberhasilan program dilakukan dengan mengacu pada metode yang dilakukan dalam program SIPT (Muslim, 2011).<sup>1</sup> Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program Lumbung

1 Kelompok Peternak dalam Pengembangan Sapi Potong Berbasis Tanaman Pangan (SIPT)

Mataraman adalah keragaman KWT baik dari kekawatn SDM maupun lembaga, kelemahan juklak yang kurang bisa diaplikasikan di daerah yang berbeda. Minimnya masyarakat anggota kelompok untuk sungguh-sungguh dalam budidaya pemanfaatan pekarangan dikarenakan kondisi ketergantungan pada komoditas dari luar daerah maupun impor sehingga budidaya sendiri mrnjadi kurang mendapat perhatian

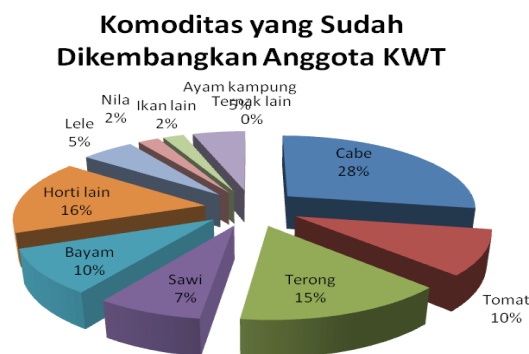
**Tabel 1. Hasil Focus Group Discussion dalam “Bongkar Masalah” pada 5 kelompok KWT berdasarkan tiga indikator utama dalam Program Lumbung Mataraman\*)**

No	Nama Kelompok dan alamat	Kendala	Modal Utama
1	KWT. Surya Hijau Kota (Score 65)	- mekanisme kerja kelompok berjalan kurang baik, hanya bergantung pada ketua dan sekretaris KWT. - pemanfaatan pekarangan/kebun bibit kurang optimal dan keterbatasan lahan (sempit). - proses pembelajaran berlangsung cukup baik, tetapi hasil pembelajaran tidak terlihat	- Tingkat pendidikan SDM cukup tinggi meskipun jumlahnya terbatas. - Dukungan lembaga terutama dinas pemerintah cukup baik.
2	KWT. Rejeki Lancar – Bantul (Score 70)	- mekanisme kerja kelompok berjalan cukup baik, tidak hanya bergantung pada ketua dan sekretaris KWT. - pemanfaatan pekarangan/kebun bibit kurang optimal. - proses pembelajaran berlangsung cukup baik kelambagaan terlalu formal	- Kualitas SDM cukup tinggi dan status sos-ek cukup baik.. - Dukungan masyarakat cukup baik.
3	KWT. Mumpuni Kulon Progo (Score 65)	- mekanisme kerja kelompok berjalan kurang baik, hanya bergantung ketua dan beberapa anggota KWT. - pemanfaatan pekarangan/kebun bibit kurang optimal. - proses pembelajaran kurang berhasil Ada kecenderungan KWT sebagai formalitas.	- KWT berpengalaman dan pengetahuan anggota SDM cukup baik - Dukungan dinas teknis pemerintah cukup baik.
4	KWT. Lestari Gunung Kidul (Score 85)	- mekanisme kerja kelompok sangat baik, melibatkan hamper seluruh anggota KWT. - pemanfaatan pekarangan dan kebun bibit sangat baik dan optimal - proses pembelajaran berlangsung baik, dan hasil pembelajaran dapat terlihat	- Secaram umum kualitas SDM sangat baik meskipun tingkat pendidikan relative rendah dan secara demografi cenderung menua. - Dukungan masyarakat dan dinas pemerintah cukup baik.
5	KWT Sembung Bumi – Sleman (Score 75)	- mekanisme kerja kelompok cukup baik, hanya bergantung pada ketua dan sekretaris KWT. - pemanfaatan pekarangan dan kebun bibit cukup optimal. - proses pembelajaran berlangsung cukup baik, terdapat konflik dalam KWT tapi bias diatasi.	- Kualitas SDM cukup baik meskipun jumlahnya terbatas. - Dukungan masyarakat dan dinas pemerintah cukup baik.

\*) Hasil inisiasi penelitian (sementara) Januari-Mei 2017

Kendala lainnya yang dirasakan sangat serius dan harus segera dibenahi bersifat sangat beragam pada setiap kelompok di lapangan. Hasil pemetaan (sementara) terkait kendala dan modal utama yang bisa dilaporkan disajikan dalam Tabel 1. Variabel utama untu mengukur partisipasi dalam kelembagaan kelompok adalah sebagai berikut; *pertama* mekanisme kerja kelompok yang berjalan dalam kelembagaan KWT. *Kedua* pemanfaatan pekarangan dan kebun bibit untuk pemanfaatan dan kesejahteraan bersama anggota kelompok. *ketiga* proses pembelajaran, pendampingan dan pembinaan bersama secara kolektif. Dalam hal ini dilakukan antara KWT, BKPP DIY dan Joglo Tani.

Secara umum mekanisme kerja kelompok sangat bergantung pada pengurus KWT terutama ketua kelompok sebagai motor penggerak kelembagaan. Dalam hal ini modal sosial sangat mempengaruhi berjalannya program LM. Sementara itu secara teknis pemanfaatan pekarangan dan fasilitas kebun bibit tergantung pada kesiapan SDM dan kemampuan teknis anggota kelompok. Proses pendampingan dan pembinaan yang efektif dan efisien hanya terjadi pada kelompok wanita tani yang memiliki inovasi dan semangat progresif yang berakar dalam lembaga maupun lembaga pendamping.



Sumber: Data penelitian, diolah (2017)

**Gambar 3.**  
**Komoditas yang sudah dikembangkan Anggota KWT**

Gambaran kegiatan optimalisasi pekarangan para anggota di lima KWT di DIY dijelaskan pada Gambar 3. Pada sebagian besar KWT gerakan budidaya sederhana telah diupayakan sebelum intervensi kegiatan LM dilakukan. Pada pertengahan tahun 2016 misalnya, dilakukan Gerakan Tanam Cabe (GERTAM CABE) secara nasional sehingga hasil budidaya dapat dilihat dari data pengembangan budidaya cabe di KWT tersebut. Gerakan ini merupakan inisiatif Kementerian Pertanian RI dan di DIY difasilitasi oleh Badan Penelitian dan Teknologi Pertanian (BPTP). Kegiatan ini dilakukan sebagai antisipasi menyusul fenomena mahalannya harga komoditas cabe pada awal tahun 2016. Program ini merupakan langkah awal sebagai proses pembelajaran para anggota KWT.

Selanjutnya hasil asesmen “bongkar masalah” menunjukkan hasil yang sangat beragam seperti dipaparkan dalam Tabel 1. Keberhasilan maupun kegagalan penanganan pekarangan dan pemafaatan kebun bibit pada umumnya disebabkan pada kekuatan kelompok tani berupa partisipasi masyarakat. Mekanisme kerja kelompok yang berjalan kurang baik pada umumnya disebabkan kurangnya partisipasi anggota kelompok yang ditunjukkan dengan dominasi ketua atau pengurus KWT. Sementara itu efektifitas pemanfaatan pekarangan/kebun bibit tidak sepenuhnya tergantung pada luasan lahan. Pada proses pembelajaran yang berlangsung dengan baik, keterbatasan lahan dapat diatasi dengan kesiapan dan kualitas SDM yang baik. Pada proses pembelajaran yang partisipatif, hasil pembelajaran dapat terlihat berupa pemanfaatan hasil kegiatan secara optimal.



Sumber: Data penelitian, diolah (2017)

**Gambar 4.**

### Hasil (Penjualan) Budidaya Pekarangan Anggota KWT

Peruntukan pemanfaatan pekarangan secara umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti dipaparkan dalam Gambar 4. Sebanyak 62% responden melakukan budidaya semata-mata untuk dimanfaatkan sendiri oleh keluarga atau kerabat. Titik tekan program untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan tujuan utama para anggota KWT sesungguhnya tidak bertemu pada satu titik yang sama. Karenanya agak sulit untuk memotivasi para anggota KWT tersebut untuk lebih berorientasi pada peningkatan hasil budidaya dalam rangka memperoleh penghasilan tambahan. Hanya 7% dari responden telah mengusahaakan pekarangan dengan baik dan memperoleh tambahan pendapatan sebesar lebih dari Rp 200.000 per bulan.

Meski demikian bimtek berupa motivasi SDM yang diberikan cukup dapat mendorong para anggota KWT untuk lebih berorientasi pada hasil. Selain itu beberapa pelaku usaha dan figur tertentu dalam masyarakat mampu menjadi *role model* untuk keberhasilan program ini. Pada KWT rejeki Lancar misalnya, muncul fenomena *role model* berupa figur yang adalah anggota masyarakat dengan latar belakang pekerjaan

sebagai polisi. Figur tersebut justru telah melakukan kegiatan budidaya dengan penerapan pertanian berkelanjutan yang sangat baik. Figur seperti ini dapat menjadi kunci keberhasilan replikasi demplot Lumbung Mataraman selanjutnya.

Sementara itu pelaku usaha yang sudah berhasil selain menjadi contoh untuk replikasi LM di tingkat RT juga dapat memberikan motivasi untuk diversifikasi jenis usaha. Di KWT. Surya Hijau misalnya, peruntukan kebun bibit berkembang dari sekedar penjualan bibit horti tetapi juga untuk keperluan edukasi siswa Sekolah Dasar. Sementara itu di KWT Lestari Gunung Kidul prospek baru yang sudah dijalankan selain penjualan komoditas sayur dan buah organik dalam jasa persewaan tanaman hias.

Selanjutnya keberhasilan program juga ditentukan oleh tingkat partisipasi secara lebih luas. Dukungan lembaga dari pemerintah desa dan dinas pemerintah teknis sangat mempengaruhi. Meski demikian hasil yang didapatkan sangat beragam walaupun dukungan yang sama telah diberikan kepada semua KWT.

Pembahasan kajian pertanian berkelanjutan dalam tulisan ini diakhiri dengan kesepakatan bersama bahwa program apapun harus membawa tugas konstitusinya yaitu untuk menfaat masyarakat yang sebenarnya. Karenanya ia membawa tanggung jawab besar untuk mencapai penerima manfaat yang tepat sehingga tidak hanya berujung pada foto laporan dan keberlanjutan program yang *mangkrak* (berhenti di tengah jalan - Penulis). Program yang mangkrak tersebut menjadi tanda ia sudah berkhianat pada kata berkelanjutan atau “lestari”.

Sebagai bagian penting dari penelitian ini adalah evaluasi program berdasarkan data awal berupa hasil bongkar masalah dan pendampingan di lapangan. Tindak lanjut selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan dengan wawancara mendalam bersama kelompok KWT sebagai penerima manfaat (Gambar 5).



Sumber: Data penelitian, diolah (2017)

**Gambar 5.**  
**Evaluasi Program Lumbung Mataraman oleh Anggota KWT**

Meskipun secara umum anggota kelompok sudah merasakan manfaat program dan menyatakan bahwa program LM sudah berjalan dengan baik (56% responden), hasil evaluasi ini harus dilihat secara lebih obyektif. Seperti diketahui penelitian dilakukan secara internal oleh instansi penyelenggara kegiatan sehingga bias data dan informasi oleh responden masih dimungkinkan terjadi. Karenanya tindak lanjut berdasarkan evaluasi ini kemudian menitikberatkan pada masukan dan koreksi dari KWT untuk keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil evaluasi setidaknya terdapat dua hal yang menjadi *concern* untuk peningkatan program Lumbung Mataraman. Yang pertama adalah perlunya peningkatan dan praktek lapangan yang bisa dilakukan melalui *field study* KWT ke *site* yang tepat sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah diversifikasi jenis bimbingan teknis yaitu pada sub-sektor perikanan dan peternakan khususnya untuk lahan sempit.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan utama dalam kajian ini adalah adanya kemungkinan untuk menciptakan pertanian berkelanjutan melalui kegiatan pekarangan. Selanjutnya contoh analisis

menunjukkan manfaat yang diperoleh keluarga petani berupa penyediaan pangan melalui pekarangan dan peningkatan pendapatan keluarga. Analisis yang dilakukan pada sampel demplot KWT di Semanu Gunung Kidul menunjukkan peningkatan penghasilan keluarga sebesar Rp 1.107.000,- per bulan dengan hasil RCR sebesar 1,23.

Meski demikian cita-cita ini tidak mudah dicapai karena mensyaratkan banyak hal. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan implementasi di 5 KWT menunjukkan bahwa (a) Pemerintah harus lebih fokus pada kesiapan SDM pertanian berupa kelompok petani yang memiliki karakter dan kesiapan untuk menjadikan pertanian sebagai laku, dan tidak sekedar *project oriented* dan (b) untuk mencapai cita-cita pertanian dan pangan lestari dibutuhkan pula satu perangkat kegiatan dan program yang berkelanjutan.

Saran Kebijakan (a) Orientasi pada proses sehingga program dan kegiatan pertanian berkelanjutan harus memiliki terobosan dan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan (b) Reformasi program yang berorientasi pada dampak. Karenanya pemilihan *beneficiary* dengan mekanisme pemilihan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) menjadi bagian paling penting dalam menentukan penerima program.

## 1. EPILOG

Tugas manusia adalah secara bersama-sama membuat perubahan dalam rangka kebaikan. Demikian halnya dalam setiap kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat, kita memiliki kewajiban yang sama. Tidak hanya berhenti pada menginterpretasikan dunia tapi berusaha mengubahnya, atas nama tugas konstitusi dan kesejahteraan masyarakat.

“The philosophers have only *interpreted* the world, in various ways; the point, however, is to change it.”

Karl Marx, *Theses on Feuerbach* (1845)

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Anonim. 2012. *Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)*. Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Solidaritas Istri Kabinet Bersatu (SIKAB).
- Lightfoot, Clive, J. Peter Dalsgaard dan Mary Ann Bjmbao. 1997. *Farmer Participatory Procedures for Managing and Monitoring Sustainable Farming Systems\**. *Asian Farm. Syst. Assoc.* 2 (1993): pages 67-87
- Kassam, Y. 1998. *Knowledge Shared: Participatory Evaluation in Development Cooperation* Kumarian Press Edward T. Jackson and Yusuf Kassam editors. International Development Research Centre.
- Henderso, G. 1991. *Geographic Thought A praxis perspective*. Edited by George Henderson and Marvin Waterstone. Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon.
- Kusumasari, Bevaola. 2016. Climate Change and Agricultural Adaptation in Indonesia. *Jurnal MIMBAR*, Vol. 32, No. 2st (December, 2016), pp.243-253
- German Development Institute. 2012. Post 2015: How to Reconcile the *Millennium Development Goals* (MDGs) and the *Sustainable Development Goals* (SDGs)? Briefing Paper 18/2012

- RRPG. 2016. *Advancing Inclusive Rural Development and Transformation in a Challenging Environment*. Conference Proceeding. Rural Research and Planning Group dan Universiti Teknologi Malaysia.
- ICRA. 2000. *Sustainable Farming Practices: Towards reducing the expansion of the Forest Savanna Transition Zone of the Sekyere-West and Ejura-Sekyedumase districts of the Ashanti Region of Ghana*. International Centre and Research Institute.
- Niggli, U., Fließbach, A., Hepperly, P. and Scialabba, N. 2009. Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems. FAO, April 2009, Rev. 2 – 2009.
- Pattinama, Marcus J. 2009. PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN KEARIFAN LOCAL (STUDI KASUS DI PULAU BURU-MALUKU DAN SURADE-JAWA BARAT). *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 13, NO. 1, JULI 2009: 1-12* Program Studi Sosial Ekonomi/Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura.
- Praptono, B. 2010. KAJIAN POLA BERTANI PADI SAWAH DI KABUPATEN PATI DITINJAU DARI SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus di Kecamatan Pati). Tesis. PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCA SARJANA UNVERSTAS DIPONEGORO SEMARANG.
- Kass, I Wayan. 2011. LOCAL WISDOM IN RELATION TO CLIMATE CHANGE. *Journal of ISSAAS Vol. 17, No. 1:22-27 (2011)*. Department of Biology, Faculty of Sciences. Udayana University Denpasar, Bali, Indonesia
- Hadi, A.P. 2006. Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*
- Matanari, Daniel., Salmiah, Emalisa . 2010. PERANAN KELOMPOK TANI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PADI SAWAH (*oriza Sativa*) DI DESA HUTAGUGUNG KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI.
- Muslim, Chairul. 2011. PERANAN KELOMPOK PETERNAK SAPI POTONG DENGAN PENDEKATAN SISTEM INTEGRASI PADI TERNAK (SIPT) DI NUSA TENGGARA BARAT, JAWA TIMUR, DAN JAWA BARAT. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang, Departemen Pertanian.
- Sterling, A. 2006. Analysis, participation and power: justification and closure in participatory multi-criteria analysis. *Land Use Policy 23 (2006) 95–107*. University of Sussex.
- Fraser, Evan D.G., A. J. Dougill, W.E. Mabee, M. Reed, and P. McAlpine. 2006. Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management. *Journal of Environmental Management 78 (2006) 114–127*.